

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Tapin menyusun Dokumen Renja 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tapin.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Inspektorat Kabupaten Tapin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan Inspektorat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin dapat berperan secara optimal membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Tapin.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tapin yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

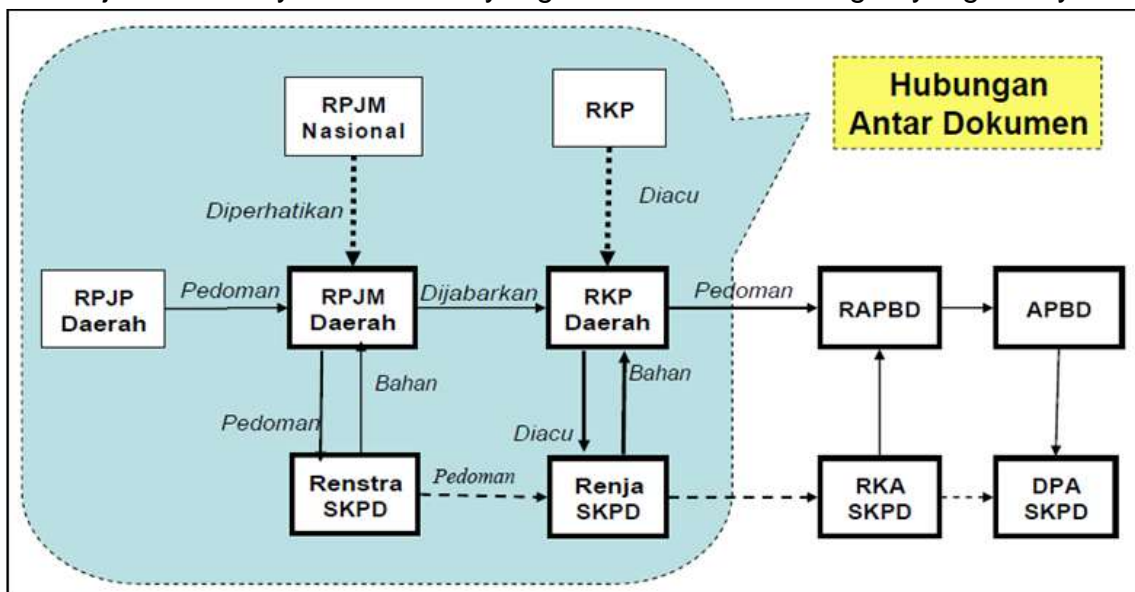
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2020 SOPD Inspektorat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
 19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
 20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan dari penyusunan Renja 2020, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Inspektorat;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Inspektorat;



3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SOPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PD Inspektorat dan Kabupaten Tapin tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan perkiraan caaian tahun 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2020-2=2018) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3. Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
 3. Program Penunjang dan Pendukung Good Governance
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:**
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah sd Tahun 2019 Kabupaten Tapin**

Inspektorat Kabupaten Tapin

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	BELANJA								
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG								
5.1.1	Belanja Pegawai				4.326.846.221		4.326.846.221		100
5.2	BELANJA LANGSUNG								
4.02.4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	Persentase	100	1.128.473.000	100	1.128.473.000	100	100
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telpon dan internet	Bulan	12	85.800.000	12	85.800.000	100	100
4.02.4.02.01.01.05	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu ketersediaan ATK	Bulan	12	48.209.000	12	48.209.000	100	100
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	100	100

4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan konsumsi	Bulan	12	118.104.000	12	118.104.000	100	100
4.02.4.02.01.01.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	780.860.000	12	780.860.000	100	100
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	Waktu ketersediaan peralatan kelistrikan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan Jasa kebersihan kantor	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	100	100
4.02.4.02.01.01.13	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan Jasa keamanan kantor	Bulan	12	28.800.000	12	28.800.000	100	100
4.02.4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA YANG KONDISI BAIK	Persentase	100	246.260.685	100	246.260.685	100	100
4.02.4.02.01.02.01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu ketersediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	61.704.685	12	61.704.685	100	100
4.02.4.02.01.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor	Bulan	12	12.671.000	12	12.671.000	100	100
4.02.4.02.01.02.03	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	26	171.885.000	26	171.885.000	100	100
4.02.4.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KINERJA & KEUANGAN YANG WAJIB DISUSUN	Persentase	100	1.401.400	100	1.401.400	100	100

4.02.4.02.01.03.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	401.400	4	401.400	100	100
4.02.4.02.01.03.02	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan kegiatan	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100
4.02.4.02.01.04	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PERSENTASE OBYEK PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN REGULER TEPAT WAKTU	Persentase	100	2.722.985.000	100	2.722.985.000	100	100
		PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN REGULER YANG TELAH DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU	Persentase	100		100		100	
		PERSENTASE SKPD YANG MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TEPAT WAKTU	Persentase	100		100		100	
		PERSENTASE ADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI TEPAT WAKTU	Persentase	100		100		100	
4.02.4.02.01.04.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Laporan	92	1.857.100.000	92	1.857.100.000	100	100

4.02.4.02.01.04.02	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah kasus-kasus yang terselesaikan yang berkaitan dengan Pemkab Tapin	Laporan	12	204.200.000	12	204.200.000	100	100
4.02.4.02.01.04.03	evaluasi Lakip	Jumlah laporan evaluasi Lakip	Laporan	1	30.650.000	1	30.650.000	100	100
4.02.4.02.01.04.05	Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah laporan hasil pemantauan	Laporan	92	483.835.000	92	483.835.000	100	100
4.02.4.02.01.04.06	Review RKA SKPD	Jumlah hasil laporan Reviu RKA	Laporan	2	119.550.000	2	119.550.000	100	100
4.02.4.02.01.04.07	Review Lakip	Jumlah laporan Reviu Lakip	Laporan	1	27.450.000	1	27.450.000	100	100
4.02.4.02.01.04.8	Penyusunan PKPT serta program lainnya penunjang good governance	Jumlah dokumen PKPT serta program penunjang good governance	Dokumen	1	200.000	1	200.000	100	100
4.02.4.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS	PERSENTASE APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL YANG BERSERTIFIKAT	Persentase	100	100.210.000	100	100.210.000	100	100
4.02.4.02.01.05.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentasi APIP yang memiliki kompetensi	Persentase	90	87.200.000	90	87.200.000	100	100
4.02.4.02.01.05.02	Tim penilai P2UPD	Jumlah administrasi kepegawaian P2UPD yang terlayani	Orang	11	13.010.000	11	13.010.000	100	100

4.02.4.02.01.06	PROGRAM PENUNJANG DAN PENDUKUNG GOVERNANCE GOOD	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU	Persentase	100	872.042.500	100	872.042.500	100	100
		PERSENTASE SKPD YANG DIEVALUASI PENERAPAN SPIP DENGAN HASIL MINIMAL LEVEL 3	Persentase	100		100		100	
		PERSENTASE SELF ASSESMENT PER ELEMENT DENGAN KESIMPULAN ELEMENT LEVEL 3	Persentase	60		60		100	
4.02.4.02.01.06.01	Review laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Reviu	Laporan	1	44.450.000	1	44.450.000	100	100
4.02.4.02.01.06.02	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP d	Jumlah temuan yang terselesaikan	Dokumen	2	2.010.000	2	2.010.000	100	100
4.02.4.02.01.06.03	Penyelesaian kerugian negara	Jumlah kasus yang terselesaikan	Laporan	1	102.262.500	1	102.262.500	100	100
4.02.4.02.01.06.05	LHKPN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKPN	Dokumen	1	68.850.000	1	68.850.000	100	100
4.02.4.02.01.06.06	LHKASN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKASN	Dokumen	1	47.100.000	1	47.100.000	100	100

4.02.4.02.01.06.08	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Jumlah kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI	Laporan	4	67.800.000	4	67.800.000	100	100
4.02.4.02.01.06.13	Penyerapan anggaran keuangan desa	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa	Laporan	4	65.960.000	4	65.960.000	100	100
4.02.4.02.01.06.15	Sapu bersih pungli	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang Saber Pungli	Laporan	1	261.410.000	1	261.410.000	100	100
4.02.4.02.01.06.16	RAD PPK	Jumlah laporan review aksi PPK Pemda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku	Laporan	1	56.850.000	1	56.850.000	100	100
4.02.4.02.01.06.19	Unit pengendalian gratifikasi	Jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi	Laporan	4	48.800.000	4	48.800.000	100	100
4.02.4.02.01.06.20	Satgas kapabilitas APIP dan SPIP	Jumlah laporan Self Assesment Kapabilitas APIP	Laporan	4	106.550.000	4	106.550.000	100	100
4.02.4.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI BIDANG PENGAWASAN	PERSENTASE LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN YANG WAJIB DIBUAT DAN TEPAT WAKTU	Persentase	100	700.000	100	700.000	100	100
4.02.4.02.01.07.01	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan	Laporan	1	700.000	1	700.000	100	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD Inspektorat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SOPD Inspektorat. Keberhasilan kinerja SOPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SOPD Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat
Kabupaten Tapin

NO	INDIKATOR	TARGET						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	4.62%	9.25%	18.51%	27.77%	37.03%	46%	-4,23%	9.25%	18.51%	27.77%	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020-2021 memakai angka target
2	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%	100%	60,92%	80%	85%	90%	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020-2021 memakai angka target
3	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	95%	75,29%	75%	80%	85%	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020-2021 memakai angka target
4	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020-2021 memakai angka target
5	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020-2021 memakai angka target
6	Level maturitas Pemda minimal "Terdefinisi" (Level 3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Realisasi 2019 dan proyeksi 2020-2021 memakai angka target

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemda	Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	<p><u>Makna Indikator</u> : Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Inspektorat sebagai lembaga pengawas intern pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada SKPD agar bebas dari penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran perundang-undangan khususnya yang terkait dengan kerugian negara/daerah.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator</u> : Temuan kerugian negara/daerah merupakan tolak ukur semakin baik atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : $\text{Jumlah TKN-1} / \text{Jumlah TKN} \times 100\%$</p>	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	Laporan Hasil Pemeriksaan	TKN-1=Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun Lalu TKN=Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun ini
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	<p><u>Makna Indikator</u> : Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler merupakan perwujudan perbaikan obyek yang bersangkutan kearah yang lebih baik</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator</u> : Semakin taat obyek yang bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan reguler menggambarkan keseriusan SKPD untuk melakukan perbaikan</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : $\text{Jumlah Temuan Reguler yang terselesaikan} / \text{Jumlah Total Rekomendasi Reguler} \times 100\%$</p>	Sekretaris	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	

	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	Makna Indikator : Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI merupakan kelemahan tata kelola keuangan pemerintah daerah Alasan Pemilihan Indikator : Semakin taat obyek yang bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Rumus Perhitungan : (Jumlah Temuan BPK RI yang terselesaikan dibagi Jumlah Total Rekomendasi BPK RI) dikali 100%	Sekretaris	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	
Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD Pemda	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	Makna Indikator : Akuntabilitas adalah merupakan komitmen untuk bertanggungjawabkan kinerja masing-masing SKPD atas keberhasilan ataupun kendala yang dihadapi demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan Alasan Pemilihan Indikator : dengan semakin meningkatnya SAKIP di masing-masing SKPD diharapkan pemerintah daerah menjadi semakin baik melayani masyarakat Rumus Perhitungan : (Jumlah SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi Jumlah SKPD yang dievaluasi) dikali 100%	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut	
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	Makna Indikator : Aduan masyarakat merupakan salah satu instrumen pemeriksaan selain pemeriksaan reguler, aduan masyarakat ini dapat menjadi alternatif lain yang tidak terpantau didalam pemeriksaan reguler sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan dengan melakukan aduan Alasan Pemilihan Indikator : dengan tertanganinya aduan masyarakat tersebut dapat dijadikan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut Rumus Perhitungan : (Jumlah Aduan masyarakat yang ditangani sampai <u>selesai</u> * dibagi Jumlah seluruh aduan masyarakat yang masuk) dikali 100%	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	Laporan Hasil Pemeriksaan	Selesai= Sampai terbitnya LHP

Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kab Tapin	Level maturitas Pemda minimal "Terdefinisi" (Level 3)	<p><u>Makna Indikator</u> : SPIP adalah sebuah sistem pengendalian internal agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan optimal, sistem pengendalian intern lebih baik dari pada sistem pengendalian eksternal karena pengendalian internal lebih mengetahui resiko dari kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan maka dari itu penilaian maturitas menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana suatu Pemda telah menerapkan SPIP</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator</u> : Agar dapat mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah dapat memberi keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u> : Minimal "terdefinisi" (Level 3)</p>	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	Laporan Hasil Penilaian mandiri	
--	---	---	--	---------------------------------	--

Capaian sasaran strategis Inspektorat Tahun 2018:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal	Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah	4.62%	-4.23 %	0 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	75 %	60.92 %	81.22%
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	70 %	75.29 %	107.55 %
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	N/A	N/A
4	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrated” (Level 3)	Integrated	Integrated	100 %
6	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)	Terdefinisi	Terdefinisi	100 %
Rata-rata capaian sasaran strategis					81.46 %

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Inspektorat sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;



2. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan;
5. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL INSPEKTORAT TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3.901.958.685	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3.901.958.685	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin	Waktu penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air (bln)	12	85.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapin	Waktu penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air (bln)	12	85.800.000	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tapin	Waktu ketersediaan ATK (bln)	12	48.273.071	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tapin	Waktu ketersediaan ATK (bln)	12	48.273.071	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapin	Waktu ketersediaan brg cetakan dan penggandaan (bln)	12	40.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapin	Waktu ketersediaan brg cetakan dan penggandaan (bln)	12	40.500.000	

4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tapin	Waktu ketersediaan Konsumsi (bln)	11	148.117.200	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tapin	Waktu ketersediaan Konsumsi (bln)	11	148.117.200	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tapin	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi (bln)	12	3.524.268.414	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tapin	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi (bln)	12	3.524.268.414	
6	Penyediaan Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Waktu ketersediaan penerangan bangunan kantor (bln)	12	10.000.000	Penyediaan Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Waktu ketersediaan penerangan bangunan kantor (bln)	12	10.000.000	
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tapin	Waktu ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	16.200.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tapin	Waktu ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln)	12	16.200.000	
8	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tapin	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (bln)	12	28.800.000	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tapin	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (bln)	12	28.800.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tapin	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	163.495.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tapin	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	163.495.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tapin	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	12	84.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tapin	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	12	84.000.000	

			dinas/operasional (bln)					dinas/operasional (bln)			
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tapin	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (bln)	12	12.600.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tapin	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (bln)	12	12.600.000	
3	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Tapin	Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor (unit)	22	66.895.000	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Tapin	Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor (unit)	22	66.895.000	
3	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tapin	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	1.101.400	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tapin	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	1.101.400	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tapin	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (lap)	11	401.400	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tapin	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (lap)	11	401.400	
2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tapin	Laporan keuangan kegiatan (lap)	1	700.000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tapin	Laporan keuangan kegiatan (lap)	1	700.000	

4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Tapin	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	100	146.700.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Tapin	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	100	146.700.000	
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100		
			Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100				Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100		
			Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100				Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100		
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tapin	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (lap)	92	65.100.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tapin	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (lap)	92	65.100.000	

2	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Tapin	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/dengan tujuan tertentu (Lap)	12	3.200.000	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Tapin	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/dengan tujuan tertentu (Lap)	12	3.200.000	
3	Evaluasi Lakip	Tapin	Jumlah Laporan hasil evaluasi sesuai ketentuan (lap)	1	4.000.000	Evaluasi Lakip	Tapin	Jumlah Laporan hasil evaluasi sesuai ketentuan (lap)	1	4.000.000	
4	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tapin	Jumlah Laporan hasil pemantauan sesuai ketentuan (lap)	92	65.000.000	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tapin	Jumlah Laporan hasil pemantauan sesuai ketentuan (lap)	92	65.000.000	
5	Review RKA SKPD	Tapin	Jumlah Laporan hasil review RKA (lap)	2	5.500.000	Review RKA SKPD	Tapin	Jumlah Laporan hasil review RKA (lap)	2	5.500.000	
6	Review LAKIP	Tapin	Jumlah Laporan hasil review LAKIP (lap)	1	800.000	Review LAKIP	Tapin	Jumlah Laporan hasil review LAKIP (lap)	1	800.000	
7	Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance	Tapin	Jumlah dokumen PKPT (dok)	1	200.000	Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance	Tapin	Jumlah dokumen PKPT (dok)	1	200.000	
8	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah laporan review RKPD (lap)	1	2.900.000	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Tapin	Jumlah laporan review RKPD (lap)	1	2.900.000	

5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tapin	Persentase aparat pengawas fungsional yang bersertifikat (%)	100	129.210.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tapin	Persentase aparat pengawas fungsional yang bersertifikat (%)	100	129.210.000	
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tapin	Jumlah fungsional auditor/P2UPD yang mengikuti diklat dan bimtek aparatur pengawasan (orang)	22	116.200.000	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tapin	Jumlah fungsional auditor/P2UPD yang mengikuti diklat dan bimtek aparatur pengawasan (orang)	22	116.200.000	
2	Tim Penilai P2UPD	Tapin	Jumlah hasil penetapan angka kredit P2UPD (orang)	11	13.010.000	Tim Penilai P2UPD	Tapin	Jumlah hasil penetapan angka kredit P2UPD (orang)	11	13.010.000	
6	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Tapin	Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100	683.157.500	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Tapin	Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100	683.157.500	
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	100				Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	100		

			tepat waktu					tepat waktu			
			Persentase self assesment per element dengan kesimpulan element level 3	60				Persentase self assesment per element dengan kesimpulan element level 3	60		
1	Review laporan keuangan pemerintah daerah	Tapin	Jumlah Laporan hasil review sesuai ketentuan (lap)	1	1.800.000	Review laporan keuangan pemerintah daerah	Tapin	Jumlah Laporan hasil review sesuai ketentuan (lap)	1	1.800.000	
2	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP dan Irjen	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	2	2.010.000	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP dan Irjen	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	2	2.010.000	
3	Penyelesaian kerugian negara	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	1	102.162.500	Penyelesaian kerugian negara	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	1	102.162.500	

4	LHKPN	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKPN (dok)	1	68.800.000	LHKPN	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKPN (dok)	1	68.800.000
5	LHKASN	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKASN (dok)	1	47.080.000	LHKASN	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKASN (dok)	1	47.080.000
6	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI (dok)	1	46.000.000	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Tapin	Jumlah dokumen rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI (dok)	1	46.000.000
7	Satgas Kapabilitas APIP	Tapin	Jumlah laporan self assesment kapabilitas APIP (lap)	4	48.000.000	Satgas Kapabilitas APIP	Tapin	Jumlah laporan self assesment kapabilitas APIP (lap)	4	48.000.000
8	Penyerapan Anggaran Keuangan Desa	Tapin	Jumlah Laporan penyerapan anggaran keuangan desa (lap)	4	300.000	Penyerapan Anggaran Keuangan Desa	Tapin	Jumlah Laporan penyerapan anggaran keuangan desa (lap)	4	300.000
9	Saber Pungli	Tapin	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang saber pungli (lap)	1	260.265.000	Saber Pungli	Tapin	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang saber pungli (lap)	1	260.265.000

10	RAD PPK	Tapin	Jumlah laporan review pelaksanaan aksi PPK Pemda yg bersesuaian dg ketentuan yg berlaku (lap)	4	150.000	RAD PPK	Tapin	Jumlah laporan review pelaksanaan aksi PPK Pemda yg bersesuaian dg ketentuan yg berlaku (lap)	4	150.000	
11	Unit Pengendalian Gratifikasi	Tapin	jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (lap)	1	44.000.000	Unit Pengendalian Gratifikasi	Tapin	jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (lap)	1	44.000.000	
12	Satgas SPIP	Tapin	Jumlah laporan kegiatan satgas SPIP (lap)	3	62.590.000	Satgas SPIP	Tapin	Jumlah laporan kegiatan satgas SPIP (lap)	3	62.590.000	
7	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	Tapin	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100	46.450.000	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	Tapin	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100	46.450.000	
1	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Tapin	Jumlah laporan Ikhtisar hasil pengawasan (lap)	1	46.450.000	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Tapin	Jumlah laporan Ikhtisar hasil pengawasan (lap)	1	46.450.000	
					5.072.072.585					5.072.072.585	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2020, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SOPD Inspektorat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten XYZ

Nama SOPD : SOPD XXX

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat selama tahun 2020 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2020 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan



9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2016-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;



3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Inspektorat selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Inspektorat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2020 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tujuan dan Sasaran Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (Impac)	Kondisi Awal		Target				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP (Predikat)	CC	B	B	B	B	BB	BB
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemda	Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	-58,53%	-4,23%	9.25%	18.51%	27.77%	37.03%	46%
		Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	70,22%	60,92%	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	76,97%	75,29%	75%	80%	85%	90%	95%
		Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)	-	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemda	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern Minimal "Integrated" (Level 3)	2	3	3	3	3	3	3

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 beserta prognosisnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan TA 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa Kebersihan kantor
 - c) Penyediaan alat tulis kantor
 - d) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - f) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - g) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - h) Penyediaan instalasi listrik & Komponen penerangan bangunan kantor
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 - c) Pengadaan dan perlengkapan peralatan Kantor
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikshtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
 - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - b) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - d) Review RKA SKPD
 - e) Review LAKIP



- f) Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance
- g) Evaluasi LAKIP
- 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - b) Tim Penilai P2UPD
- 6. Program penunjang dan pendukung good governance
 - a) Review laporan keuangan pemerintah daerah
 - b) Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP dan Irjen
 - c) Penyelesaian kerugian negara
 - d) LHKPN
 - e) LHKASN
 - f) Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI
 - g) Satgas SPIP
 - h) Penyerapan Anggaran Keuangan Desa
 - i) Saber Pungli
 - j) Unit Pengendalian Gratifikasi
 - k) Satgas Kapabilitas APIP
 - l) RAD PPK
- 7. Program peningkatan informasi bidang pengawasan
 - a) Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Inspektorat TAHUN 2020


Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2020 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2021			
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10		
	Inspektorat						5.072.072.585	0	0		1.606.072.900		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
4	2												
4	2	1				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.901.958.685	0	0	100	362.829.000	
4	2	1	1		TAPIN	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telpon, internet, listrik dan air (bln)	12 Bln	85.800.000	0	0	Bln	85.800.000
4	2	1	2		TAPIN	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu ketersediaan ATK (Bln)	12 Bln	48.273.071	0	0	Bln	48.209.000
4	2	1	3		TAPIN	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang dan cetakan dan penggandaan (Bln)	12 Bln	40.500.000	0	0	Bln	40.500.000
4	2	1	4		TAPIN	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan konsumsi (Bln)	11 Bln	148.117.200	0	0	Bln	142.320.000
4	2	1	5		TAPIN	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu ketersediaan konsultasi dan	12 Bln	3.524.268.414	0	0	Bln	5.000.000

								koordinasi (Bln)						
4	2	1	6	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan penerangan bangunan kantor (Bln)	12 Bln	10.000.000	0	0	Bln	10.000.000
4	2	1	7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12 Bln	16.200.000	0	0	Bln	3.000.000
4	2	1	8	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			TAPIN	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12 Bln	28.800.000	0	0	Bln	28.000.000
4	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	163.495.000	0	0	100	161.100.000
4	2	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bln)	12 Bln	84.000.000	0	0	Bln	84.000.000
4	2	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (Bln)	12 Bln	12.600.000	0	0	Bln	12.600.000
4	2	2	3	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor			TAPIN	Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan	22 Unit	66.895.000	0	0	Unit	64.500.000

								Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100%					
4	2	4	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			TAPIN	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (Lap)	92 Laporan	65.100.000	0	0	Laporan	65.100.000
4	2	4	2	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu			TAPIN	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/dengan tujuan tertentu (Lap)	12 Laporan	3.200.000	0	0	Laporan	3.200.000
4	2	4	3	Evaluasi Lakip			TAPIN	Jumlah laporan hasil evaluasi lakip (Lap)	1 Laporan	4.000.000	0	0	Laporan	4.000.000
4	2	4	5	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			TAPIN	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut (Lap)	92 Laporan	65.000.000	0	0	Laporan	65.000.000
4	2	4	6	Review RKA SKPD			TAPIN	Jumlah laporan hasil review RKA (lap)	2 Laporan	5.500.000	0	0	Laporan	0
4	2	4	7	Review LAKIP			TAPIN	Jumlah laporan review lakip (lap)	1 Laporan	800.000	0	0	Laporan	800.000
4	2	4	8	Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance			TAPIN	Jumlah dokumen PKPT (dok)	1 Dokumen	200.000	0	0	Dokumen	200.000
4	2	4	10	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah laporan review LKPD (Lap)	1 Laporan	2.900.000	0	0	Laporan	2.900.000
4	2	5		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	terlaksananya administrasi perkantoran		Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang	100%	129.210.000	0	0	100	129.210.000

								bersertifikat						
4	2	5	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan			TAPIN	Jumlah fungsional auditor/P2UPD yang mengikuti diklat dan bimtek aparaturngawasan (Orang)	22 Orang	116.200.000	0	0	Orang	116.200.000
4	2	5	2	Tim Penilai P2UPD			TAPIN	Jumlah Hasil Penetapan angka kredit P2UPD (Orang)	11 Orang	13.010.000	0	0	Orang	13.010.000
4	2	6		Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	terlaksananya administrasi perkantoran		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	90%	683.157.500	0	0		771.192.500
							Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100%						
							Persentase self assesment per element dengan kesimpulan element level 3	85%						
4	2	6	1	Review laporan keuangan pemerintah daerah			TAPIN	Jumlah laporan hasil review LKPD (Lap)	1 Laporan	1.800.000	0	0	Laporan	1.800.000

4	2	6	2	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP d		TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut (dok)	2 Dokumen	2.010.000	0	0	Dokumen	2.010.000
4	2	6	3	Penyelesaian kerugian negara		TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	1	102.162.500	0	0		102.262.500
4	2	6	5	LHKPN		TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi LKPN (dok)	1 Dokumen	68.800.000	0	0	Dokumen	136.050.000
4	2	6	6	LHKASN		TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKASN (dok)	1 Dokumen	47.080.000	0	0	Dokumen	47.100.000
4	2	6	7	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI		TAPIN	Jumlah dokumen rekapitulasi pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI (dok)	1 Dokumen	46.000.000	0	0	Dokumen	67.800.000
4	2	6	10	Penyerapan Anggaran keuangan Desa		TAPIN	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa (Lap)	4 Laporan	300.000	0	0	Laporan	300.000
4	2	6	12	Sapu Bersih Pungli		TAPIN	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang saber pungli (Lap)	1 Laporan	260.265.000	0	0	Laporan	261.410.000
4	2	6	13	RAD PPK		TAPIN	Jumlah laporan review pelaksanaan aksi PPK pemda yang	4 Laporan	150.000	0	0	Laporan	150.000

							bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku (Lap)							
4	2	6	16	Unit Pengendalian Gratifikasi			TAPIN	Jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (Lap)	1 Laporan	44.000.000	0	0	Laporan	44.000.000
4	2	6	17	Satgas Kapabilitas APIP			TAPIN	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas apip (Lap)	4 Laporan	48.000.000	0	0	Laporan	50.080.000
4	2	6	19	Satgas SPIP			TAPIN	Jumlah laporan kegiatan satgas SPIP (lap)	3 Laporan	62.590.000	0	0	Laporan	58.230.000
4	2	7		Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	terlaksananya administrasi perkantoran		Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100%	46.450.000	0	0	100	38.640.000
4	2	7	1	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan			TAPIN	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan (Lap)	1 Laporan	46.450.000	0	0	Laporan	38.640.000
 TOTAL										5.072.072.585	0	0		1.606.072.900

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan		Pagu Indikatif
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.901.958.685
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.800.000
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.200.000
3.	Penyediaan Alat tulis kantor	48.273.071
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.500.000
5.	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
6.	Penyediaan makanan dan minuman	148.117.200
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	3.524.268.414
8.	Penyediaan jasa keamanan kantor	28.800.000
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	163.495.000
1.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	66.895.000
2.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	84.000.000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	12.600.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.101.400
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	401.400
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	700.000



	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	146.700.000
1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	65.100.000
2.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/pemeriksaandengan tujuan tertentu	3.200.000
3.	Evaluasi Lakip	4.000.000
4.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	65.000.000
5.	Review RKA SKPD	5.500.000
6.	Review LAKIP	800.0000
7.	Penyusunan PKPT serta program lainnya Penunjang Good Governance	200.000
8.	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah	2.900.000
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	129.210.000
1.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	116.200.000
2.	Tim Penilai P2UPD	13.010.000
	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	683.157.500
1.	Review laporan keuangan pemerintah daerah	1.800.000
2.	Pemutakhiran data seluruh SKPD Hasil temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP dan Irjen	2.010.000
3.	Penyelesaian kerugian negara	102.162.500
4.	LHKPN	68.800.000
5.	LHKASN	47.080.000
6.	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	46.000.000
7.	Satgas Kapabilitas APIP	48.000.000
8.	Penyerapan Anggaran keuangan Desa	300.000
9.	Saber Pungli	260.265.000
10.	Unit Pengendalian Gratifikasi	44.000.000
11.	Satgas SPIP	62.590.000
12.	RAD PPK	150.000
	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	46.450.000
1.	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	46.450.000
	J U M L A H	5.072.072.585



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2020.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SOPD Inspektorat Kabupaten Tapin maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah.

BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN

